



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN LUWU TIMUR



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Renja ini disusun untuk memenuhi kewajiban Instansi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, Perubahan Permendagri atau pengganti Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Renja ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Renja ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Renja dimasa mendatang.

Ucapan terima kasih kepada tim yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Renja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2023 ini.

Malili, Juni 2022

KEPALA DINAS,

KAMAL RASYID, S.STP

Pangkat :Pembina Utama Muda

NIP. 19810511 199912 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB. I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Landasan Hukum	
1.3. Maksud dan Tujuan	
1.4. Sistematika Penulisan	
BAB. II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	
2.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah	
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.	
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.	
BAB. III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	
3.3. Program dan Kegiatan	
BAB. IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB. V : PENUTUP.	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Amanat UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan perubahan permendagri nomor 86 Tahun 2017. Maka setiap SKPD wajib menyusun Renja. Renja SKPD disusun dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Dalam rangka mengantisipasi lingkungan strategi sangat dinamis dengan faktor-faktor berpengaruh yang berubah dengan cepat dan sering tidak terduga, maka dikembangkan model perencanaan strategi yang intinya mengacu pada Visi-Misi dan berbasis pada analisis lingkungan strategi.

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja disusun untuk satu tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian strategi, program, kegiatan pencapaian Renstra, dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Rencana Strategis (Renstra) secara khusus harus dijadikan acuan sepenuhnya untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan.



Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) Tahun.

Perumusan rancangan Renja ini merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2023:

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024



18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
21. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur untuk merumuskan kebijakan dan program strategi guna meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan serta berdasarkan prinsip-prinsip good governance. Renja sebagai alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian sasaran/tujuan strategi, visi dan misi organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :



Bab. I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Bab. III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Penjelasan mengenai Program dan Kegiatan serta Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPd, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya



Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Penjelasan mengenai Rencana Kerja Perangkat Daerah seret Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan

Bab. V Penutup

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021



2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

Penyusunan Renja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja berpedoman pada Renstra SKPD yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur juga mengacu pada Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang diimplementasikan melalui dukungan dana yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Strategi yang telah ditetapkan.

Secara umum evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2021 dilakukan dengan cara mengkaji antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja sasaran yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja SKPD. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*Performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang di perlukan di masa mendatang. Hal ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana suatu organisasi telah mewujudkan misi yang di tetapkan.

Berkaitan dengan pelaksanaan Tahun Anggaran 2022 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur, telah wajib melakukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD berdasarkan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020. Evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD Tahun 2021 dapat dilihat melalui Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan yang mengacuh pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur dan Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2021-2026 disajikan pada Tabel T-C 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur



Tabel. 1
Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100%	9	10=5+7+9	11=10/4
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				100	100	100,00%	100		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17	17	100,00%	17		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu			3	3	100,00%	2		
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun			2	2	100,00%	1		
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun						1		
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun			2	2	100,00%	1		
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD						1		



**Rencana Kerja
Distransnaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100%	9	10=5+7+9	11=10/4
		yang disusun tepat waktu								
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun						2	2	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu			10	10	100,00%	8	2	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100	100	100,00%	100		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayarkan			28	24	85,71%	25	6	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun			19	19	100,00%	19	6	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100	100	100,00%	100		
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu			2	2	100,00%	2		



**Rencana Kerja
Distransnaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100%	9	10=5+7+9	11=10/4
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD						1		
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100	100	100,00%	100		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Yang diaadakan			44	44	100,00%			
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Administrasi Kepegawaian yang dimutakhirkan			12	12	100,00%	12	3	
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			7	7	100,00%	7	4	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100	100	100,00%	100		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan			4	4	100,00%	5	1	



**Rencana Kerja
Distransnaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100%	9	10=5+7+9	11=10/4
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan			13	13	100,00%	13	3	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan/atau penggandaan yang diadakan			7	7	100,00%	7	2	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			72	72	100,00%	72	18	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi			100	100	100,00%	100	25	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah yang dilaksanakan			193	193	100,00%	185	50	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan (Persen)			100	100	100,00%	100		
1	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubel yang diadakan			6	6	100,00%	1		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya yang diadakan			6	6	100,00%	5		



**Rencana Kerja
Distransnaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100%	9	10=5+7+9	11=10/4
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100	100	100,00%			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan			1250	1250	100,00%	1250	312	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan			36	36	100,00%	36	9	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang terbayarkan			3	3	100,00%	4	1	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100	100	100,00%	100		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			21	21	100,00%	19	5	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			26	26	100,00%	26	6	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			1	1	100,00%	1	1	



**Rencana Kerja
Distransnaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100%	9	10=5+7+9	11=10/4
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				100	100	100,00%	100		
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				65	65	100,00%	65		
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan (kerjasama ATS)			30	35	116,67%	60		
		Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan K3			35	30	85,71%	35		
		Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan kerjasama BLK						16		
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan (Persen)			41,98	39,26	93,52%	41,98		
	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesempatan kerja/penempatan tenaga kerja			3000	3225	107,50%	3000		
1	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan			330	330	100,00%	330		



**Rencana Kerja
Distransnaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100%	9	10=5+7+9	11=10/4
2	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Calon Tenaga Kerja Mandiri yang mengikuti Pelatihan			40	40	100,00%	40		
		Jumlah Kelompok Tenaga Kerja Mandiri yang difasilitasi dan didampingi			5	5	100,00%	4		
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				100	100	100,00%	100		
1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Informasi Lowongan Kerja yang disebarluaskan			100	181	181,00%	100	60	
	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				100	100	100,00%	100		
1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang difasilitasi			4	3	75,00%	4		
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				16,77	17	101,37%	16,77		



**Rencana Kerja
Distransnaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100%	9	10=5+7+9	11=10/4
	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				100	100	100,00%	100		
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan						15	3	
2	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan			48	48	100,00%	45		
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				100	100	100,00%	100		
1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angka Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial yang di Fasilitas						5		



**Rencana Kerja
Distransnaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100%	9	10=5+7+9	11=10/4
2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja Pertahun yang difasilitasi dan di Mediasi			25	25	100,00%	15	13	
3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Organisasi Pekerja/Pengusaha yang dibina			32	32	100,00%	32	8	
4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan			3	3	100,00%	4		
5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Rancangan UMK yang ditetapkan			1	1	100,00%	1		
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI							230		
	Kegiatan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi							100		
1	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang diidentifikasi						1		



**Rencana Kerja
Distransnaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100%	9	10=5+7+9	11=10/4
2	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Penyediaan Lahan Pembangunan Kawasan Transmigrasi						50		
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Masyarakat Transmigran yang dibina (%)			230	230	100,00%	100		
	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				100	100	100,00%	1		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah MoU yang direalisasikan						3		
		Jumlah Laporan dana dekon/TP yang disusun			2	2	100,00%	2		
2	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Calon Transmigrasi yang diseleksi						50		
3	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Jamban Keluarga (RTJK) yang difasilitasi pembangunannya			80	80	100,00%	25		
4	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Transmigran yang mendapatkan Penyuluhan			50	50	100,00%	50		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				100	100	100,00%			



**Rencana Kerja
Distransnaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100%	9	10=5+7+9	11=10/4
	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian				1	1	100,00%			
1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Panjang Batas Lahan Transmigran yang Dibangun						1000		
2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Transmigran yang dibina Usaha Ekonominya/Panjang Penegasan Batas Lahan Transmigran Yang di Konstruksi (Meter)/Jumlah DED Gambar yang dibuat (Dok)			1000	1000	100,00%	50		



Sasaran 1. Meningkatnya Pengembangan dan Kemandirian Warga Transmigran

Sasaran Strategis 1 Ini Merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi dalam rangka meningkatkan penempatan warga Transmigran dan mewujudkan kemandirian masyarakat transmigrasi lokal serta peningkatan Kawasan Transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Untuk mengukur sasaran yang pertama ini ada 1 Indikator Kinerja dan rata – rata capaian kinerja sebesar 100% disajikan dalam tabel dibawah ini

Tabel 2. Realisasi Sasaran 1 Meningkatnya Produksi Pertanian Wilayah Transmigrasi

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2020		2021			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya Pengembangan dan Kemandirian Warga Transmigran	Persentase Warga Transmigran Mandiri	%	65,40%	100 %	66,65 %	66,65 %	100 %	72,41%	72,41 %

Realisasi Jumlah Produksi Pertanian Wilayah Transmigrasi sebesar 14.946,55 Ton dari target 16.327 Ton atau dengan capain realisasi 91,54 %. Total Jumlah Produksi Pertanian Wilayah Transmigrasi terdiri dari Produksi Padi sebesar 14.455,40 Ton dan Produksi Lada sebesar 491,15 Ton

Bila dibandingkan Jumlah Produksi Pertanian (Padi dan Lada) pada Tahun 2020 yaitu sebesar 16.327 Ton, Jumlah Produksi Tahun 2021 mengalami Penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan bibit unggul yang belum memadai serta ketersediaan pupuk yang belum maksimal.

Program dan kegiatan Urusan Pilihan Transmigrasi:

1. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Indikator dari program ini yaitu Jumlah Luas wilayah transmigrasi yang dikembangkan, Realisasi sebanyak 230 Ha dari target 230 Ha Luas wilayah transmigrasi yang dikembangkan atau dengan capaian kinerja 100%. Wilayah transmigrasi yang dikembangkan tersebut berada di SKPC Koromalai Desa Mahalona Kecamatan Towuti. Wilayah yang dikembangkan tersebut duperuntukan untuk penempatan calon transmigran baik itu transmigran daerah asal maupun transmigran lokal.

Ada 1 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan yang menunjang capaian program yaitu:

- 1) Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator dari kegiatan ini yaitu Persentase Warga Transmigran yang ditempatkan. Realisasi 100% dari target 100% Persentase Warga Transmigran yang ditempatkan. Dari 23 warga yang direncanakan akan ditempatkan pada tahun 2021, kesemuanya telah ditempatkan.

- a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Output subkegiatan ini yaitu Jumlah Laporan Keuangan dan Barang Dana Tugas Pembantuan Yang disusun, realisasi 2 dokumen dari target 2 Dokumen (100%)

- b) Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Output dari subkegiatan ini yaitu Jumlah Calon Transmigran Yang diseleksi, realisasi 80 KK dari target 80 KK yang telah diseleksi (100%)

- c) Sub Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi

Ouput dari sub kegiatan yaitu Jumlah transmigran yang mendapatkan penyuluhan, realisasi 50 KK dari target 50 KK (100%)

2. Program Pengembangan Kawasan Transmigran



Indikator dari Program ini yaitu Persentase Masyarakat Transmigran yang dibina. Realisasi dari program ini yaitu 100% dari target 100%. Semua warga transmigran yang telah ditempatkan, akan dilakukan pembinaan agar nantinya dapat hidup mandiri dan dapat meningkatkan taraf hidup.

Ada 1 Kegiatan dan 1 Sub kegiatan yang menunjang Program ini:

- 1) Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian
Indicator dari kegiatan ini yaitu Jumlah Satuan Permukiman Transmigran yang dikembangkan, realisasi 1 kawasan dari target 1 kawasan. Kawasan transmigrasi yang saat ini dikembangkan yaitu berada di UPT SKPC 1 Koromalai, Desa Mahalona Kecamatan Towuti.
 - a) Sub Kegiatan yaitu Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman
Ada 2 output dari sub kegiatan ini. Yang pertama yaitu Jumlah DED/Gambar yang dibuat, realisasi 3 Dokumen dari target 3 Dokumen (100%). Output yang kedua yaitu Panjang Penegasan Batas Lahan Transmigran Yang di Konstruksi, realisasi 1000 Meter dari target 1000 Meter (100%)

Sasaran 2. Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Baru

Sasaran Strategis 2 (dua) ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi dalam rangka menciptakan tenaga kerja yang berkualitas, Produktif dan Mandiri sehingga dapat bersaing dalam dunia kerja dan mengurangi tingkat pengangguran terbuka (TPT)

Tabel 3. Realisasi Sasaran 2 Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Baru

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2020		2021		Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra	
			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi			Capaian
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Baru	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru	%	18,48	100%	18,75	40,05%	100%	22,86	100%

Realisasi Capaian Sasaran Strategis 2 (dua) ini sebesar 40,05 % dari target 18,75% Penyerapan Tenaga Kerja Baru. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya Jumlah Penempatan tenaga kerja / lowongan kerja pada tahun 2021 yaitu sebanyak 3225 orang, dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah 1299 orang.

Formulasi perhitungan indicator penyerapan tenaga kerja baru yaitu Jumlah Penempatan tenaga kerja (pencari kerja) dibagi dengan jumlah penganggur pada tahun n.%

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur pada per Agustus 2021, Jumlah Penduduk usia Kerja sebanyak 221.700 orang, sedangkan jumlah angkatan kerja berjumlah 162.182 orang. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, penduduk yang bekerja berjumlah 154.130 orang dan yang tidak bekerja berjumlah 8.052 orang, sehingga Tingkat Pengangguran terbuka sebesar 4,96%. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020 yaitu sebesar (4,46%) Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat 0,50%. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah angkatan kerja sedangkan lapangan pekerjaan yang belum

Program dan kegiatan Urusan Wajib bukan pelayanan dasar yaitu :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator dari Program ini yaitu Persentase calon Tenaga kerja yang ditingkatkan kapasitas sumber daya Manusianya dengan formulasi Jumlah calon Tenaga Kerja yang lulus pelatihan dibagi jumlah tenaga kerja yang mengikuti



pelatihan x 100%. Realisasi 100% dari target 100%. Pada tahun 2021 sebanyak 65 orang peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kompetensi (Pendidikan Kerjasama ATS dan Sertifikat SIO dan Dump Truck) dan semua peserta yang berjumlah 65 orang dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat keahlian. Para peserta yang dinyatakan lulus dan telah mendapatkan keahlian, nantinya diharapkan dapat bersaing dalam pasar kerja.

Ada 1 (satu) Kegiatan dan 1 SubKegiatan yang menunjang program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja tersebut yaitu

1) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

Output kegiatan ini yaitu Jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dengan realisasi 65 orang dari target 65 orang dengan tingkat capaian 100%.

a) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

Output sub kegiatan ini ada 2 (dua) yaitu Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kerjasama ATS sebanyak 30 Orang dari target 30 orang (100%) dan Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi sebanyak 35 orang dari target 35 orang (100%)

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator Program yaitu Persentase tenaga kerja yang telah dilatih dan bersertifikat yang mendapatkan lapangan kerja baru. Realisasi Program 74,36 % dari target 85% dengan tingkat capain 87,48%. Hal ini dipengaruhi oleh banyak calon tenaga kerja yang telah dilatih yang belum memberikan info terkait status pekerjaannya dan belum terdata. Dari 429 orang yang telah dilatih, sebanyak 319 orang yang telah bekerja dan 110 orang yang belum terdata. Ada 3 (tiga) Kegiatan dan 4 (empat) subkegiatan yang menunjang Program ini yakni:



- 1) Kegiatan Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
Indikator dari Kegiatan ini yaitu Persentase rata-rata pelayanan kerja yang dilaksanakan dengan target 100% dengan realisasi capaian 100%. Segala jenis pelayanan antarkerja yang terdaftar seperti Pelayanan Kartu Pencari Kerja (AK1), Pelayanan AKAD/AKL telah terlaksana.
 - a) Subkegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja.
Kegiatan ini berupa bimbingan dan penyuluhan bagi calon tenaga kerja (pencari kerja) dengan output Jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat. Target kegiatan 330 orang dengan realisasi 330 orang atau dengan tingkat capaian 100%.
 - b) Kegiatan pelatihan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)
Output kegiatan ada 2 (dua) yaitu Jumlah calon tenaga kerja mandiri yang mengikuti pelatihan dengan realisasi 40 orang dari target 40 orang (100%)
Kegiatan ini berupa pelatihan dan bimbingan bagi calon tenaga kerja mandiri atau yang mempunyai usaha sendiri untuk pengembangan usahanya baik itu dari segi Manajemen Usaha maupun SDM. Serta indikator kedua yaitu Jumlah Kelompok Kerja Terampil yang didampingi dan difasilitasi dengan realisasi 5 kelompok dari target 5 Kelompok (100%).
Kegiatan ini berupa fasilitasi pendampingan dan monitoring bagi kelompok usaha mandiri yang telah mendapatkan bantuan Pemerintah Pusat (Dana Luncuran) melalui Kementerian Tenaga Kerja

- 2) Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
Indikator dari kegiatan ini yaitu Persentase Informasi Lowongan Kerja Yang Terdaftar Yang disebarluaskan. Target dari kegiatan ini yaitu yaitu 100% dengan capaian 100%. Seluruh Informasi lowongan kerja yang dilaporkan dan terdaftar pada Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian, telah



disebarluaskan ke Masyarakat umum baik melalui distribusi Info Lowongan kerja ke Pemerintah Kecamatan, maupun melalui Media Online.

a) Subkegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

Output dari Subkegiatan ini yaitu Jumlah Informasi Lowongan Kerja Yang disebarluaskan dengan realisasi 187 Info Loker dari target 100 info loker (187%). Hal ini disebabkan karena pada triwulan IV, ada beberapa Perusahaan yang melaksanakan Penerimaan tenaga kerja

3) Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator dari kegiatan ini yaitu Persentase tenaga kerja Indonesia yang bermasalah yang difasilitasi. Target 100% tenaga kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang difasilitasi dengan realisasi capaian 100%. Semua Tenaga Kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang dilaporkan pada Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian telah difasilitasi terkait penanganan dan pengurusannya

3. Program Hubungan Industrial

Indikator pada program ini Angka sengketa pengusaha dan pekerja pertahun, Target kasus yang difasilitasi dan dimediasi 16,77% dan sedangkan realisasi sebesar 17,01%. Formulasi dari indicator ini yaitu Jumlah Kasus perselisihan yang tercatat dibagi dengan jumlah Total Perusahaan yang terdaftar.

Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang tercatat pada tahun 2021 berjumlah 25 kasus, mengalami penurunan dibanding tahun 2020 yang berjumlah 34 kasus. Sedangkan Jumlah Perusahaan yang terdaftar pada tahun 2021 sebanyak 147 Perusahaan.

Hubungan Industrial adalah hubungan yang terbentuk antara pengusaha, pekerja/ buruh dan pemerintah. Hubungan tersebut dilaksanakan melalui sarana Hubungan Industrial yang meliputi : Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Organisasi Pengusaha, Lembaga Kerjasama Tripartit, Lembaga Kerjasama Bipartit,



peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Untuk menjembatani agar hubungan industrial dapat berjalan dengan harmonis, dinamis dan berkeadilan, maka Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Khususnya Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek melaksanakan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial khususnya kepada pengusaha dan pekerja/buruh dan Serikat Pekerja / Serikat Buruh.

Pada Program ini ada 2 Kegiatan dan 5 Subkegiatan yang menunjang pencapaian program yaitu:

- 1) Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota .
Output kegiatan yaitu Persetase jumlah pekerja yang terdaftar melalui program Jamsostek. Target 100% dengan capaian realisasi 100%. Seluruh Pekerja yang tercatat pada Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian telah terdaftar pada program Jamsostek
 - a) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
Output subkegiatan ini yaitu Jumlah perusahaan yang dibina sebanyak 45 Perusahaan dari target 45 Perusahaan (100%) serta oupt yang kedua yaitu Jumlah pesan informasi ketenagakerjaan yang dipublikasikan sebanyak 3 jenis dari target 3 jenis (100%)
- 2) Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
Indikator kegiatan yaitu Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Yang difasilitasi dan dimediasi, realisasi 100% dari target 100%. Semua kasus perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan dan tedaftar pada Dinas



Transmigrasi dan Tenaga Kerja telah difasilitasi dan beberapa di lanjutkan pada tahap mediasi.

- a) Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Output dari Sub kegiatan ini adalah Angka/Jumlah sengketa pengusaha dan pekerja pertahun yang difasilitasi dan dimediasi, target 25 Kasus sedangkan realisasi sebanyak 25 kasus atau dengan tingkat capaian 100%
- b) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
Output dari Sub kegiatan ini yaitu Jumlah organisasi pekerja /pengusaha yang dibina, realisasi 32 dari target 32 Jumlah organisasi pekerja /pengusaha (100%)
- c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
Output sub kegiatan ini yaitu Jumlah rekomendasi yang dihasilkan, realisasi 3 rekomendasi dari target 3 Jumlah rekomendasi yang dihasilkan oleh Lembaga Tripartit
- d) Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
Output Sub kegiatan ini yaitu Jumlah Rancangan UMK Yang ditetapkan, target 1 Dokumen dengan realisasi 1 Dokumen Rancangan UMK Yang ditetapkan. Upah Minimum Kabupaten yang ditetapkan yaitu UMK Tahun 2022 dengan besaran Rp. 3.226.263,-



Sasaran 2. Meningkatkan Akuntabilitas Perencanaan dan Keuangan Daerah

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Ada 8 (delapan) Kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Subkegiatan yang menunjang Program ini yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Realisasi 100% dari target 100% dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Target 3 Dokumen, realiasi 10 Dokumen (100%) dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, 2 Dokumen, realisasi 2 Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu (100%)
 - c) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, target 2 Dokumen, realisasi 2 Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu (100%)
 - d) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target 10 Dokumen, realisasi 10 Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (100%)
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan ini yaitu Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu, realisasi 100% dari target 100%
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Realisasi sebanyak 24 Orang dari target 27 Orang ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangannya Terbayarkan (88.88%), sedangkan realisasi keungan mencapai 92,84%. Realisasi kinerja tidak mencapai target karena ada beberapa Jabatan Struktural yang belum terisi, yaitu jabatan eselon



IIIa (Sekretaris Dinas) 1 orang, dan Jabatan eselon IVa (Kepala Seksi) 4 Orang.

b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Realisasi 19 Dokumen dari target 19 Dokumen laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (100%)

3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Indikator dari Kegiatan ini yaitu Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi Barang perangkat daerah, realisasi 100% dari target 100%

a) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Realisasi 2 Dokumen dari target 2 Dokumen Laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu (100%)

4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator dari kegiatan ini yaitu Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah, realisasi 100 % dari target 100%.

a) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Realisasi 44 paket dari target 44 paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Yang diadakan (100%)

b) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Realisasi 12 Dokumen dari target 12 Dokumen Jumlah Laporan Data Administrasi Kepegawaian Yang di Mutakhirkan (100%)

c) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Realisasi 7 Orang dari target 7 Orang aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar perundang-undangan (100%)

5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator dari kegiatan ini yaitu Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi, realisasi 100% dari target 100%.



- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia, Realisasi 4 jenis dari target 4 jenis (100%)
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang disediakan, realisasi 13 jenis dari target 13 jenis (100%)
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetak Dan Penggandaan untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tersedia, realisasi 7 jenis dari target 7 jenis (100%)
- d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang disediakan, realisasi 72 eksemplar dari target 72 eksemplar (100%)
- e) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
Jumlah Tamu Yang difasilitasi Kunjungannya, realisasi 100 orang dari target 100 orang (100%)
- f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan realisasi 43 kali dari target 43 kali (100%)
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan, realisasi 100% dari target 100%
 - a) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
Jumlah Mebel Yang di Adakan, realisasi 6 unit dari target 6 unit (100%)
 - b) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya



Jumlah Peralatan Mesin Lainnya Yang diadakan, realisasi 6 unit dari target 6 unit (100%)

7) Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator dari kegiatan ini yaitu Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpenuhi, realisasi 100 % dari target 100%

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar Yang di Agendakan, realisasi 1250 dari target 1250 surat masuk dan surat keluar yang diagendakan (100%)

b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayarkan, realisasi 36 Rekening dari target 36 rekening (100%)

c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan, realisasi 3 orang dari target 3 orang (100%)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan PD berupa kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD dengan target kinerja dan dampak atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan PD sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai IKK yang telah ditetapkan berdasarkan Urusan:



Tabel 4
Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian		Proyeksi		Cat.
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(16)	(17)	(18)
	Indikator Kinerja Impact													
	Tingkat partisipasi angkatan kerja				72,36	70,48	70,98	71,10	67,50	72,36		70,98	71,10	
	Tingkat pengangguran terbuka (persen)				4,46	4,39	4,28	4,17	3,92	4,46		4,28	4,17	
	Rasio penduduk yang bekerja				95,54	95,61	95,72	95,83	98,08	95,54		95,72	95,83	
	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja				Na	Na	Na	Na	Na	Na		Na	Na	
	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas				0,60	0,60	0,65	0,69	0,72	0,60		0,65	0,69	



Rencana Kerja
Distransnaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target	Target	Target	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian		Proyeksi		Cat.
		SPM	IKK	Indikator Lainnya	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(16)	(17)	(18)
	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja				Na	Na	Na	Na	Na	Na		Na	Na	
	Kontribusi Transmigrasi terhadap PDRB													
	transmigrasi swakarsa				Na	Na	Na	Na	Na	Na		Na	Na	
	Indikator Kinerja (Outcome)													
	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Pertahun (sengketa)				22,51	9,93	9,93	9,27	9,27	22,51		9,93	9,27	
	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) (Persen)				8,82	13,33	13,33	14,29	14,29	8,82		13,33	14,29	



Rencana Kerja
Distransnaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target	Target	Target	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian		Proyeksi		Cat.
		SPM	IKK	Indikator Lainnya	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(16)	(17)	(18)
	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan (Persen)				45,87	41,87	41,98	42,57	43,07	45,87		41,98	42,57	
	Keselamatan dan Perlindungan				Na	Na	Na	Na	Na	Na		Na	Na	
	Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi Peserta Program Jamsostek (Persen)				100	100	100	100	100	100		100	100	
	Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah (Persen)				0	0	0	0	0	0		0	0	
	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (Persen)				Na	Na	Na	Na	Na	Na		Na	Na	
	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan				Na	Na	Na	Na	Na	Na		Na	Na	
	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan				75,75	75,75	75,60	75,70	75,75	75,75		75,60	75,70	



Rencana Kerja
Distransaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian		Proyeksi		Cat.
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(16)	(17)	(18)
	berbasis Kompetensi (Persen)													
	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat (Persen)				100	100	100	100	100	100		100	100	
	Besaran Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Kewirausahaan (Persen)				100	100	100	100	100	100		100	100	
	Rasio Lulusan S1/S2/S3 (Orang)				483,81	488,81	498,76	500,23	510,23	483,81		498,76	500,23	



Berdasarkan hasil evaluasi laporan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur terlihat masih banyak permasalahan yang perlu diidentifikasi, yaitu:

2.2.1. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja

Pengangguran akan menimbulkan masalah ekonomi dan sosial bagi individu yang mengalaminya. Pengangguran juga akan berdampak negative terhadap keadaan ekonomi, politik sosial bagi daerah yang mempunyai tingkat pengangguran yang tinggi. Pengangguran sangat berpengaruh terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan pada suatu wilayah atau daerah.

Dalam kaitan itu, di Daerah Kabupaten Luwu Timur, sebagai daerah yang selama ini ekonominya didukung oleh industri pertambangan, bagi sejumlah masyarakat yang berada pada kawasan lingkaran tambang, pekerjaan menjadi karyawan Perusahaan tambang dan kontraktor adalah pilihan utama yang paling di minati, selain profesi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang termasuk dambaan bagian besar dari warga masyarakat terdidik di daerah ini.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab pengangguran antara lain karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan lowongan kerja, juga disebabkan karena perubahan struktur perekonomian, perubahan teknologi, serta keinginan memperoleh pekerjaan yang lebih baik, maka perlu Meningkatkan SDM melalui informasi kerja, pendidikan, keterampilan dan keahlian/Kompetensi bagi pencari kerja

2.2.2 Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

Dalam proses produksi, tenaga kerja dan pengusaha adalah mitra yang saling mendukung dalam peningkatan produksi dan produktifitas. Dalam hubungan industrial sering terjadi perselisihan akibat penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang tidak sesuai, sehingga di perlukan

keterlibatan pemerintah dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu berupa mediasi, maka perlu :

- ❖ Meningkatnya program perlindungan dan lembaga ketenagakerjaan
- ❖ Meningkatnya pemahaman mengenai undang – undang ketenagakerjaan
- ❖ Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan

2.2.3 Bidang Ketransmigrasian

Program transmigrasi merupakan program Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keseimbangan dan pemerataan Pembangunan Daerah dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran serta pemerataan penyebaran penduduk dan ketenagakerjaan.

Disamping itu pembangunan pemukiman transmigrasi harus memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan ketahanan pangan dan penyediaan, pemantapan ketahanan Nasional, mengembangkan komoditas unggulan untuk menghasilkan bahan baku energy alternative serta mendukung pemerataan investasi. Untuk mempercepat proses adaptasi dengan lingkungan sekitarnya serta mencegah timbulnya gejolak sosial akibat perubahan transmigran dengan masyarakat sekitar agar memahami dan mengerti tentang pentingnya hubungan kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam membangun daerah khususnya daerah Kabupaten Luwu Timur.

Untuk diterapkan kepada transmigran agar bisa memahami dan mengerti tentang tugas, hak dan kewajiban dan larangan yang harus di kerjakan didalam pembinaan dan penempatan unit pemukiman transmigrasi (UPT), maka perlu :

- ❖ Meningkatnya program pengembangan wilayah tranmsigrasi
- ❖ Meningkatnya program transmigrasi lokal

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD



Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD dilakukan guna melihat kondisi semua aspek yang terkait dengan eksistensi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur beserta perkembangannya beberapa tahun ini terutama menyangkut pelayanan public (*public service*) dan tanggung jawab (*akuntabilitas*) dalam upaya mewujudkan pengelolaan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Identifikasi ini berguna untuk melihat sampai dimana posisi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur saat ini dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang untuk mempertahankan keberhasilan dan mengeliminir kegagalan.

Faktor-faktor tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebutuhan program dan kegiatan pada rencana kerja untuk tahun yang di rencanakan.

Berbagai faktor lingkungan baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan pembangunan dalam bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerjadi Kabupaten Luwu Timur.

Bedasarkan hasil idenfikasi permasalahannya kaitannya dengan rencana pembangunan Nasional (Renstra K/L) dan Provinsi (Renstra Provinsi), tata ruang dan lingkungan serta pelaksanaan MDGs, maka isu-isu strategis yang menjadi fokus pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dn perindustrian adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja

Pengangguran akan menimbulkan masalah ekonomi dan sosial bagi individu yang mengalaminya. Pengangguran juga akan berdampak negative terhadap keadaan ekonomi, politik sosial bagi daerah yang mempunyai tingkat pengangguran yang tinggi Pengangguran sangat berpengaruh terhadap



pencapaian kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan pada suatu wilayah atau daerah.

Dalam kaitan itu, di Daerah Kabupaten Luwu Timur, sebagai daerah yang selama ini ekonominya didukung oleh industry pertambangan, bagi sejumlah masyarakat yang berada pada kawasan lingkaran tambang, pekerjaan menjadi karyawan Perusahaan tambang dan kontraktornya adalah pilihan utama yang paling di minati, selain profesi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang termasuk dambaan bagian besar dari warga masyarakat terdidik di daerah ini.

Meningkatnya pengangguran terbuka pada tahun 2021 disebabkan karena adanya ketidakseimbangan pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja baru. Jumlah pencari kerja terus bertambah seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Demikian pula laju pertumbuhan penduduk usia produktif yang siap bersaing mengisi peluang pasar kerja, tidak terlepas dari kecenderungan terus meningkatnya tamatan lembaga - lembaga pendidikan formal. Pertumbuhan lapangan kerja baru yang masih belum memadai dengan Kondisi tersebut memberikan imbas bagi kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu Timur.

2. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

Dalam proses produksi, tenaga kerja dan pengusaha adalah mitra yang saling mendukung dalam peningkatan produksi dan produktifitas. Dalam hubungan industrial sering terjadi perselisihan akibat penerapan peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan yang tidak sesuai, sehingga di perlukan keterlibatan pemerintah dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu berupa mediasi. Hal tersebut diakibatkan Kurangnya pemahaman pengusaha dan pekerja/buruh tentang Norma-norma yang diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan serta Perbedaan pandangan mengenai penetapan tingkat upah sering memicu perselisihan antara buruh dan pengusaha

3. Bidang Transmigrasi

Program transmigrasi merupakan program Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keseimbangan dan pemerataan Pembangunan Daerah dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran serta pemerataan penyebaran penduduk dan ketenagakerjaan.

Disamping itu pembangunan pemukiman transmigrasi harus memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan ketahanan pangan dan penyediaan, pemantapan ketahanan Nasional, mengembangkan komoditas unggulan untuk menghasilkan bahan baku energy alternative serta mendukung pemerataan investasi.

Untuk mempercepat proses adaptasi dengan lingkungan sekitarnya serta mencegah timbulnya gejolak sosial akibat perubahan transmigran dengan masyarakat sekitar agar memahami dan mengerti tentang pentingnya hubungan kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam membangun daerah khususnya daerah Kabupaten Luwu Timur. Untuk diterapkan kepada transmigran agar bisa memahami dan mengerti tentang tugas, hak dan kewajiban dan larangan yang harus di kerjakan didalam pembinaan dan penempatan unit pemukiman transmigrasi (UPT).

Beberapa hambatan dan masalah yang dihadapi dalam program transmigrasi diantaranya yaitu Masih adanya sengketa lahan di pemukiman Tansmigrasi, Infrastruktur yang masih kurang memadai, dan Sertifikat lahan pekarangan, lahan usaha satu dan lahan usaha dua yang merupakan hak milik warga Transmigrasi belum terbit.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya dengan memperhatikan dokumen RPJP, RPJMD, dan Renstra SKPD. Selain itu, review ini juga didasari atas kegiatan yang dilaksanakan oleh



Provinsi (RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan), RPJMN dan Renstra Kementerian/Lembaga terkait sehingga membutuhkan penyesuaian sebagai upaya sinergitas dan konsistensi. Pada proses perjalanannya, beberapa rancangan awal mengalami perubahan dan perbaikan sesuai kebutuhan, ketersediaan dan efisiensi anggaran serta efektifitas suatu program dalam pelaksanaannya.

Dalam Visi Misi Bupati Terpilih periode 2021-2026, Urusan Tenaga Kerja mempunyai program prioritas seperti yang tertuang dalam Misi 2 yaitu Berkembangnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas dengan kebijakan peningkatan daya saing tenaga kerja. Dalam hal ini, Program Prioritas Tenaga Kerja yaitu Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Calon Tenaga Kerja sehingga memerlukan target serta anggaran yang lebih dari rancangan awal Renja 2022 seperti yang terlihat pada Tabel TC-31

Berikut kami sajikan review rancangan awal RKPD Kab. Luwu Timur dan analisa kebutuhan Renja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 dalam tabel berikut :



Tabel 5
Tabel T-C 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00	5.488.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00	4.071.029.431	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100,00	84.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100,00	60.362.295	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	2,00	10.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	2,00	6.149.640	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	1,00	6.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	1,00	3.808.975	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1,00	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1,00	2.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	1,00	5.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	1,00	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)	1,00	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)	1,00	2.000.000	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	8,00	55.000.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	8,00	42.403.680	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun (Dokumen)	2,00	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun (Dokumen)	2,00	2.000.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100,00	3.672.000.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100,00	3.309.050.982	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayarkan	33,00	3.624.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayarkan	33,00	3.267.453.062	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	19,00	48.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	19,00	41.597.920	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase laporan BMD pada Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	95,00	20.000.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase laporan BMD pada Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	95,00	12.331.010	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu	2,00	15.000.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu	2,00	10.331.010	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD (Dokumen)	1,00	5.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD (Dokumen)	1,00	2.000.000	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100,00	98.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100,00	97.217.460	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut yang diadakan	48,00	40.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut yang diadakan	48,00	26.400.000	
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Laporan Data Administrasi Kepegawaian yang dimutakhirkan	12,00	32.000.000	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Laporan Data Administrasi Kepegawaian yang dimutakhirkan	12,00	30.867.460	
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek, Diklat, Workshop, Seminar Perundang-undangan	7,00	26.000.000	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek, Diklat, Workshop, Seminar Perundang-undangan	7,00	39.950.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	95,00	345.000.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	95,00	315.435.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	5,00	2.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	5,00	1.500.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	15,00	3.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	15,00	3.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	7,00	18.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	7,00	10.575.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	72,00	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	72,00	7.500.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Tamu yang difasilitasi Kunjungannya	100,00	11.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Tamu yang difasilitasi Kunjungannya	100,00	8.010.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah yang dilaksanakan Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah yang dilaksanakan	47,00	300.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah yang dilaksanakan Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah yang dilaksanakan	47,00	284.850.000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	95,00	1.030.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	95,00	46.500.000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Meubel yang diadakan	5,00	20.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Meubel yang diadakan	5,00	21.500.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang diadakan	5,00	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang diadakan	5,00	25.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	1,00	500.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	1,00		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	3,00	110.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	3,00		
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)	1,00	350.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)	1,00		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	95,00	132.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	95,00	138.996.684	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang diadministrasikan	1500,00	20.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang diadministrasikan	1500,00	17.076.684	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Rekening Telepon, Listrik dan Air yang terbayarkan	36,00	50.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Rekening Telepon, Listrik dan Air yang terbayarkan	36,00	48.720.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang terbayarkan	3,00	62.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang terbayarkan	3,00	73.200.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	95,00	107.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	95,00	91.136.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	21,00	69.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	21,00	60.996.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	27,00	18.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	27,00	15.880.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1,00	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1,00	14.260.000	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75,70	1.382.000.000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75,70	1.287.474.263	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi	160,00	1.292.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi	160,00	1.287.474.263	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		- Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan (Kerjasama ATS) - Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan K3	160,00	1.292.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		- Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan (Kerjasama ATS) - Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan K3 - Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan kerjasama BLK	160,00	1.287.474.263	
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			100,00	90.000.000	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			100,00		
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Persentase Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	3,00	90.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Persentase Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	3,00		



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	42,57	544.000.000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	42,57	314.294.346	
	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	1280,00	378.000.000	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	#####	223.441.000	
	Pelayanan Antar Kerja		Jumlah Pemantauan terhadap Perusahaan Pemberi Kerja yang melakukan penempatan tenaga kerja baik melalui AKL maupun AKAD (Perusahaan)	50,00	25.000.000	Pelayanan Antar Kerja		Jumlah Pemantauan terhadap Perusahaan Pemberi Kerja yang melakukan penempatan tenaga kerja baik melalui AKL maupun AKAD (Perusahaan)	50,00		
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	330,00	68.000.000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	330,00	60.528.850	
	Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Calon Tenaga Kerja Mandiri yang mengikuti Pelatihan	105,00	285.000.000	Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Calon Tenaga Kerja Mandiri yang mengikuti Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha TKM dan Padat Karya yang terfasilitasi	105,00	162.912.150	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah		Persentase terlaksananya monitoring dan evaluasi LPTKS (persen)	100,00	25.000.000	Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah			100,00		
	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS		Jumlah LPTKS yang di monitoring dan evaluasi (Jumlah LPTKS)	5,00	25.000.000	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS		Jumlah LPTKS yang diberikan Izin serta diberikan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang direkrut dan ditempatkan	5,00		
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Persentase terlaksananya penyebaran informasi sistem pelayanan ketenagakerjaan dan informasi pasar kerja (persen)	100,00	41.000.000	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Persentase Rata-rata Informasi Lowongan Kerja yang disebarluaskan	100,00	52.857.346	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		Persentase terpeliharanya sistem pelayanan ketenagakerjaan dan kegiatan operasional sistem informasi pasar kerja online (persen)	100,00	10.000.000	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		Persentase terpeliharanya sistem pelayanan ketenagakerjaan dan kegiatan operasional sistem informasi pasar kerja online	100,00		
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Informasi Lowongan Kerja yang disebarluaskan	100,00	31.000.000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Informasi Lowongan Kerja yang disebarluaskan	100,00	52.857.346	
	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Tenaga Kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang difasilitasi (%)	100,00	100.000.000	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Tenaga Kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang difasilitasi	100,00	37.996.000	
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah Tenaga Kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang difasilitasi (Orang)	4,00	50.000.000	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah Tenaga Kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang difasilitasi	4,00	37.996.000	
	Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran		Jumlah Calon Pekerja Migran yang mendapatkan pelayanan (orang)	5,00	50.000.000	Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran		Jumlah Calon Pekerja Migran yang mendapatkan pelayanan	5,00		



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (%)	15,00	799.359.750	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (%)	15,00	551.491.000	
	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jumlah pekerja yang terdaftar melalui program Jamsostek	100,00	192.130.000	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jumlah pekerja yang terdaftar melalui program Jamsostek	100,00	107.900.000	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah Perusahaan yang dibina (Perusahaan)	45,00	127.130.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah Perusahaan yang dibina (Perusahaan)	45,00	78.445.000	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial		Jumlah Perusahaan yang dibina dalam Pembuatan PP/PKB (Perusahaan)	15,00	65.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial		Jumlah Perusahaan yang dibina dalam Pembuatan PP/PKB (Perusahaan)	15,00	29.455.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi dan dimediasi (%)	100,00	607.229.750	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kasus perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi dan dimediasi	100,00	443.591.000	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat /berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.		Angka Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial yang di Fasilitasi	4,00	110.365.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat /berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.		Angka Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial yang di Fasilitasi	4,00	66.031.000	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja Pertahun yang di fasilitasi dan dimediasi	20,00	146.455.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja Pertahun yang di fasilitasi dan dimediasi	20,00	156.420.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		Jumlah Organisasi Pekerja/Pengusaha yang dibina	32,00	71.000.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		Jumlah Organisasi Pekerja/Pengusaha yang dibina	32,00	58.350.000	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	4,00	150.345.250	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	4,00	86.845.000	
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Jumlah Rancangan UMK yang ditetapkan	1,00	129.064.500	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Jumlah Rancangan UMK yang ditetapkan	1,00	75.945.000	
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase Penetapan Kawasan Transmigran (%)	100,00	60.000.000	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase Penetapan Kawasan Transmigran (%)	100,00	58.948.595	
	Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		Luas Kawasan Transmigrasi yang dicanangkan (Ha)	50,00	60.000.000	Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		Luas Kawasan Transmigrasi yang dicanangkan (Ha)	50,00	58.948.595	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi		Jumlah Kawasan Transmigrasi yang diidentifikasi (Kawasan)	1,00	25.000.000	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi		Jumlah Kawasan Transmigrasi yang diidentifikasi (Kawasan)	1,00	27.017.595	
	Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi		Luas Lahan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Ha)	50,00	35.000.000	Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi		Luas Lahan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Ha)	50,00	31.931.000	
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Jumlah Luas Wilayah Transmigrasi yang di Bangun (Ha)	50,00	265.000.000	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Jumlah Luas Wilayah Transmigrasi yang di Bangun (Ha)	50,00	241.171.300	
	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah KK warga Transmigran yang ditempatkan (KK)	50,00	265.000.000	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah KK warga Transmigran yang ditempatkan (KK)	50,00	241.171.300	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah MoU yang direalisasikan dan jumlah laporan dana dekon yang selesai	3 dan 2	160.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah MoU yang direalisasikan	3 dan 2	188.200.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigrasi		Jumlah Rumah Tangga Jamban Keluarga (RTJK) yang difasilitasi pembangunannya (Unit)	25,00	25.000.000	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigrasi		Jumlah Rumah Tangga Jamban Keluarga (RTJK) yang difasilitasi pembangunannya (Unit)	25,00	15.999.360	
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Calon Warga Transmigran yang diseleksi (KK)	80,00	30.000.000	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Calon Warga Transmigran yang diseleksi (KK)	80,00	16.992.000	
	Penyuluhan Transmigrasi		Jumlah Calon Transmigran yang mendapatkan Penyuluhan (Orang)	80,00	30.000.000	Penyuluhan Transmigrasi		Jumlah Calon Transmigran yang mendapatkan Penyuluhan (Orang)	80,00	19.979.940	
	Pelatihan Transmigrasi		Jumlah Transmigran yang mendapatkan Pelatihan (Orang)	50,00	20.000.000	Pelatihan Transmigrasi		Jumlah Transmigran yang mendapatkan Pelatihan (Orang)	50,00		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Jumlah Satuan Pemukiman Transmigran yang dikembangkan	100,00	345.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Jumlah Satuan Pemukiman Transmigran yang dikembangkan	100,00	469.217.707	
	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian		Persentase Masyarakat Transmigran yang di Bina	1,00	345.000.000	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian		Persentase Masyarakat Transmigran yang di Bina	1,00	469.217.707	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman		Jumlah Transmigran yang dibina Usaha Ekonominya	50,00	45.000.000	Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman		Jumlah Transmigran yang dibina Usaha Ekonominya	50,00	145.296.807	
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman		Jumlah DED gambar yang dibuat dan Panjang Batas Penegasan Batas Lahan Transmigran yang diBangun	4 dan 1000	300.000.000	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman		Jumlah DED/Gambar yang dibuat Panjang Batas Penegasan Batas Lahan Transmigran yang diBangun	4 dan 1000	323.920.900	
	TOTAL PAGU				8.883.359.750					6.993.626.642	



Program dan kegiatan-kegiatan tersebut telah disusun dalam rancangan awal RKPD tahun 2023, namun melalui pertimbangan dan analisa kebutuhan berdasarkan target program dan kegiatan prioritas dengan mempertimbangkan anggaran yang dialokasikan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja maka beberapa kegiatan akhirnya dipadukan dan dioptimalkan dalam kegiatan yang berkaitan.

2.5 Penelahaan Usulan Program Dan Kegiatan

Sinkronisasi program prioritas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang telah ditetapkan melalui RPJMD dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui tahapan berikut :

- ✓ Kebijakan umum setiap agenda pokok pembangunan dijabarkan oleh tim perancangan daerah (BAPPELITBANGDA) yang kemudian oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja di perjelas dalam bentuk Program Prioritas dengan indikator keluaran / sasaran dan pagu indikatif yang jelas.
- ✓ Program prioritas dan pagu indikatif dari masing-masing bidang di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja akan menjadi bahan diskusi dalam Musrembang Kecamatan Untuk menyusun rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan di bahas dalam Musrembang Kabupaten.
- ✓ Hasil Musrembang Kabupaten akan menjadi bahan dalam penyusunan RKPD tahun tersebut.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 merupakan penjabaran visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026. Dalam perkembangannya pada satu tahun berjalan dimungkinkan adanya perkembangan lain yang berkaitan dengan ketersediaan dana, target kinerja, sasaran dan lain-lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan daerah harus terintegrasi dengan berbagai program yang dirancang oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi, artinya bahwa berbagai program yang dirancang diharapkan agar tidak tumpang tindih namun saling mendukung. Secara umum, keterkaitan dengan adanya RENJA Tahun 2023 pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur adalah untuk mengakomodir perkembangan perubahan sasaran kegiatan guna peningkatan pelayanan publik dan percepatan pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Di dalam bab ini dipaparkan secara umum tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan terkait dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023. Hal ini sejalan dengan program nasional yang dijalankan oleh pemerintah bahwa perlunya dilakukan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia baik pada pengenaan berupa program dan kegiatan yang dilakukan sampai kepada tingkat SKPD. Program dan kegiatan yang direncanakan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur bertujuan untuk mencapai kinerja yang diinginkan yang sesuai dengan sasaran daerah yang telah diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1. Tujuan



Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur mempunyai tujuan untuk jangka menengah tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- ✓ Meningkatkan Kesejahteraan Warga Transmigran;
- ✓ Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja;
- ✓ Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

3.2.2. Sasaran

Sasaran yang dicapai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan jangka menengah tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- ✓ Meningkatnya Produksi Pertanian Wilayah Transmigrasi;
- ✓ Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Baru;
- ✓ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Keuangan Daerah;

3.3. Program dan Kegiatan

Program kegiatan adalah kumpulan dari beberapa kegiatan yang tersusun secara sistematis dan terpadu yang apabila dilaksanakan dengan baik sesuai dengan urutan/sistematikanya akan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 dapat pada Tabel TC 33



Tabel 6
Tabel T-C 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan Penunjang								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	3.912.047.431			100	5.413.500.000
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu		100	69.362.295			100	88.500.000
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu		2	15.149.640	APBD		2	10.000.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu		1	3.808.975	APBD		1	6.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun		1	2.000.000	APBD		1	3.000.000



Rencana Kerja
Distransnaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu		1	2.000.000	APBD		1	5.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)		1	2.000.000	APBD		1	2.500.000
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu		8	42.403.680	APBD		8	59.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun (Dokumen)		2	2.000.000	APBD		2	3.000.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu		100	3.250.810.982			100	3.698.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayarkan		24	3.209.213.062	APBD		34	3.650.000.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu		19	41.597.920	APBD		19	48.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan BMD pada Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan dimanfaatkan		95	12.331.010			95	21.000.000
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu		2	10.331.010	APBD		2	16.000.000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD (Dokumen)		1	2.000.000	APBD		1	5.000.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu		100	87.747.460			100	102.000.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut yang diadakan		48	26.400.000	APBD		48	40.000.000
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Administrasi Kepegawaian yang dimutakhirkan		12	31.737.460	APBD		12	32.000.000



Rencana Kerja
Distransnaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek, Diklat, Workshop, Seminar Perundang-undangan		7	29.610.000	APBD		7	30.000.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi		95	239.163.000			95	367.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia		5	1.500.000	APBD		5	2.500.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan		15	3.000.000	APBD		15	3.500.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia		7	10.575.000	APBD		7	20.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		72	7.500.000	APBD		72	10.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi Kunjungannya		100	8010000	APBD		100	11.000.000



Rencana Kerja
Distransnaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah yang dilaksanakan Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah yang dilaksanakan		48	208.578.000	APBD		48	320.000.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan		95	22.500.000			95	890.000.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubel yang diadakan				APBD		5	20.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang diadakan		5	22.500.000	APBD		5	50.000.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan				APBD		1	450.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan				APBD		3	120.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)		1		APBD		1	250.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		95	138.996.684			95	132.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang diadministrasikan		1500	17.076.684	APBD		1500	20.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Listrik dan Air yang terbayarkan		36	48.720.000	APBD		36	50.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang terbayarkan		3	73.200.000	APBD		3	62.000.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		95	91.136.000			95	115.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		21	60.996.000	APBD		21	75.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		28	15.880.000	APBD		28	20.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		1	14.260.000	APBD		1	20.000.000
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
Tenaga Kerja									
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditingkatkan kapasitas sumber daya Manusianya		75,75	741.956.888			75,75	1.382.000.000
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi		160	741.956.888			160	1.292.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan (Kerjasama ATS) Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan K3		160	741.956.888	APBD		160	1.292.000.000
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			100				100	90.000.000
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		3		APBD		3	90.000.000
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang dilatih dan bersertifikat yang mendapatkan lapangan kerja dan usaha baru		43,07	309.414.346			43,07	556.000.000
	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Antar Kerja yang terpenuhi		1290	223.441.000			1290	380.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pelayanan Antar Kerja	Pemantauan Jumlah Perusahaan Pemberi Kerja yang melakukan penempatan tenaga kerja baik melalui AKL maupun AKAD		50		APBD		50	25.000.000
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat		330	60.528.850	APBD		330	70.000.000
	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Calon Tenaga Kerja Mandiri yang mengikuti Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha TKM dan Padat Karya yang terfasilitasi		100 dan 5	162.912.150	APBD		100 dan 5	285.000.000
	Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah			100				100	25.000.000



Rencana Kerja
Distransnaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang diberikan Izin serta diberikan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang direkrut dan ditempatkan		5		APBD		5	25.000.000
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Rata-rata Informasi Lowongan Kerja yang disebarluaskan		100	47.977.346			100	51.000.000
	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Persentase terpeliharanya sistem pelayanan ketenagakerjaan dan kegiatan operasional sistem informasi pasar kerja online		100		APBD		100	20.000.000
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Informasi Lowongan Kerja yang disebarluaskan		100	47.977.346	APBD		100	31.000.000
	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang difasilitasi		100	37.996.000			100	100.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang difasilitasi		4	37.996.000	APBD		4	50.000.000
	Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran	Jumlah Calon Pekerja Migran yang mendapatkan pelayanan		5		APBD		5	50.000.000
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi dan dimediasi Persentase jumlah pekerja yang terdaftar melalui program Jamsostek		14,5	483.003.000			14,5	805.229.750
	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pekerja yang terdaftar melalui program Jamsostek		100	107.160.000			100	197.000.000



Rencana Kerja
Distransnaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Perusahaan yang dibina Jumlah Pesan Informasi Ketenagakerjaan yang dipublikasikan		45	77.705.000	APBD		45	129.000.000
	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang dibina dalam Pembuatan PP/PKB (Perusahaan)		15	29.455.000	APBD		15	68.000.000
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi dan dimediasi		100	375.843.000			100	608.229.750
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial , Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat /berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.	Angka Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial yang di Fasilitasi		4	59.896.000	APBD		4	110.365.000
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada	Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja Pertahun yang di fasilitasi dan dimediasi		15	109.382.000	APBD		15	146.455.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Organisasi Pekerja/Pengusaha yang dibina		32	54.555.000	APBD		32	72.000.000
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan		4	84.225.000	APBD		4	150.345.250
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Rancangan UMK yang ditetapkan		1	67.785.000	APBD		1	129.064.500
	Urusan Pilihan								
	Transmigrasi								
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Luas Kawasan Transmigrasi yang dicanangkan		100	50.149.995			100	65.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang dicanangkan			50.149.995			50	65.000.000
	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang diidentifikasi			19.898.995	APBD		1	30.000.000
	Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Tersedianya Lahan Pembangunan Kawasan Transmigrasi			30.251.000	APBD		50	35.000.000
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Luas Wilayah Transmigrasi yang di Bangun dan dikembangkan			129.619.630			50	280.000.000
	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Warga Transmigran yang ditempatkan			129.619.630			50	280.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah MoU yang direalisasikan			112.627.630	APBD		3	160.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigrasi	Jumlah Rumah Tangga Jamban Keluarga (RTJK) yang difasilitasi pembangunannya				APBD		25	25.000.000
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Warga Transmigran yang diseleksi			16.992.000	APBD		80	35.000.000
	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Transmigran yang mendapatkan Penyuluhan				APBD		80	35.000.000
	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Transmigran yang mendapatkan Pelatihan (Orang)				APBD		50	25.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Satuan Pemukiman Transmigran yang dikembangkan			104.742.900			100	345.000.000
	Kegiatan Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian	Persentase Masyarakat Transmigran yang di Bina			104.742.900			1	345.000.000
	Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Transmigran yang dibina Usaha Ekonominya			42.999.838	APBD		50	45.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah DED/Gambar yang dibuat Panjang Batas Penegasan Batas Lahan Transmigran yang diBangun			61.743.062	APBD		4 dan 1000	300.000.000
					5.730.934.190				8.846.729.750



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2023 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur direncanakan melaksanakan 10 program dan 22 kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu



- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
 - b. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- 3. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - a. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelayanan Antar Kerja
 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
 - Perluasan Kesempatan Kerja
 - b. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
 - c. Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)



4. Program Hubungan Industrial

- a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
 - Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial
- b. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial , Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat /berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

4. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

- a. Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
 - Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi
 - Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi

5. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

- a. Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigrasi



- Pindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyuluhan Transmigrasi
 - Pelatihan Transmigrasi
6. Program Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- a. Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian
- Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman
 - Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman



BAB V

PENUTUP

Dokumen rencana kerja (Renja) ini disusun dengan tetap memperhatikan arahan dan substansi materi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Renja ini memiliki fungsi sebagai instrument pengarah dan pengendali pelaksanaan fungsi dan pelayanan yang akan dilakukan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran.

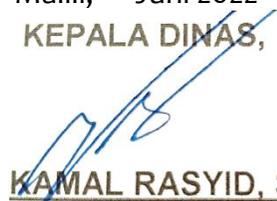
Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 ini diharapkan dikomunikasikan ke seluruh jajaran organisasi secara keseluruhan. Diseminasi Renja ini akan memungkinkan seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan mengenai kemana organisasi akan dibawa, bagaimana setiap anggota organisasi harus bekerja dan bagaimana tingkat keberhasilan diukur.

Dengan dirumuskannya Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 ini yang juga merupakan tahun pertama Renstra periode 2021-2026, semua kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode Tahun 2022 diharapkan akan mengacu pada Renja yang telah disepakati bersama dan tercapainya target dan sasaran dari program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2021-2026

Dalam Mendukung Pencapaian Renstra serta Visi dan Misi Bupati terpilih periode 2021-2026, perlu dukungan dari aspek anggaran khususnya Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi bagi calon tenaga kerja agar dapat berdaya saing.

Akhirnya, bahwa keberhasilan pelaksanaan Renja ini sangat tergantung pada kinerja seluruh aparat lingkup Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur.

Malili, Juni 2022
KEPALA DINAS,


KAMAL RASYID, S.STP

Pangkat :Pembina Utama Muda
NIP. 19810511 199912 1 001